

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Syarat Penerima Bansos Terlalu Umum

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperjelas kriteria penerima bantuan sosial, terutama untuk masyarakat yang masuk kategori rentan miskin.

Demikian diutarakan Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding seusai bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan beserta jajarannya di Jakarta, Kamis (9/7/2020). Ipi mendampingi dua komisioner KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron. Pertemuan itu membahas penyaluran serta kemajuan alokasi bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

KPK meminta DKI memadukan data penerima bansos dengan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Sosial, bisa rapi dan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kerja sama dengan aparat pengawas inter-

nal pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diminta agar diperkuat.

Ipi mengungkapkan, terdapat 31 laporan kepada KPK dari lima kota madya dan satu kabupaten di DKI. Mayoritas mengeluhkan warga yang mendaftarkan diri sebagai penerima bansos ditolak pemerintah pusat dan daerah.

"Kami mengamati, kriteria penerima bansos untuk masyarakat rentan miskin masih sangat umum sehingga banyak orang mengira dirinya layak mendapat bantuan. Semestinya diberikan kriteria terperinci agar warga benar-benar bisa menilai jika status ekonominya memang masuk kategori penerima bansos," tuturnya.

Kategori ekonomi rentan adalah masyarakat yang tidak masuk kelompok miskin, tetapi rawan jatuh miskin jika terjadi sesuatu, seperti pemecatan dari pekerjaan, jatuh sakit, atau kecelakaan. Pandemi Covid-19 yang menekan perputaran roda

perekonomian mengakibatkan perusahaan memutuskan hubungan kerja atau masyarakat tidak bisa berwiraswasta karena adanya PSBB sehingga pendapatan rumah tangga berkurang drastis.

Kelompok ini berbeda dengan kategori masyarakat miskin, dibuktikan dari keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan, Kartu Jakarta Pintar, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan skema lain dari pemerintah yang sudah berjalan sebelum pandemi Covid-19 merebak.

Faktor penting lain ialah keterbukaan data. Ipi menjelaskan, di lapangan banyak kasus ketidakpercayaan warga kepada hierarki pemerintahan paling bawah seperti lurah, rukun warga, dan rukun tetangga. Hal ini bisa dihindari dengan memasang daftar nama penerima bansos, jenis bansos yang diterima, lama penerimaan, dan jadwal penurunan bansos.

"Makanya banyak kekecewaan warga karena melihat tetangga mendapat bansos yang

berbeda atau lebih sering frekuensinya. Transparansi data ini harus dilakukan secara daring di situs pemerintah dan secara manual, seperti memasang poster di kantor kelurahan," papar Ipi.

Anies Baswedan mengatakan, pemberian bansos telah dilakukan dalam empat tahap dan kini memasuki tahap kelima. Total ada 1,1 juta keluarga yang menerima bantuan. Pada tahap pertama, data penerima diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kartu Jakarta Pintar Plus, dan masukan data dari masyarakat melalui kelurahan.

Terdapat pula masukan data dari komunitas pengemudi ojek daring; pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; serta seniman yang mengalami kesulitan mencari nafkah.

Anies menyebutkan, tim teknis di DKI terus berkomunikasi dengan KPK terkait saran ataupun kritik. Pembahasannya akan dilanjutkan pada level teknis. (DNE)